

Populisme Programatik, Populisme Teknokratis, Kebijakan Kesejahteraan, Patronase Politik, Oligarki Indonesia Dalam Perspektif Politik Kebajikan Dan Moral Di Indonesia

Kaspudin Nor^{1*} Didi Sukardi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama, Cengkareng

^{1,2}Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: Kaspudin@gmail.com¹ didisukardi@satyagama.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

10 Oktober 2026

Kata Kunci: Populisme Programatik; Populisme Teknokratis; Kebijakan Kesejahteraan; Patronase Politik; Oligarki Indonesia.

Keywords: Programmatic Populism; Technocratic Populism; Welfare Policy; Political Patronage; Indonesian Oligarchy.

Abstrak

Studi mengenai populisme di Indonesia umumnya didominasi oleh narasi pembelahan identitas dan retorika demagogi. Namun, lanskap politik kontemporer menunjukkan pergeseran signifikan melalui munculnya populisme programatik. Artikel ini menganalisis bagaimana para aktor politik di Indonesia mengadopsi strategi populisme pragmatis dan teknokratis untuk meraih dukungan massa. Berbeda dengan populisme klasik yang mengandalkan sentimen suku, ras, dan agama (SARA), populisme programatik berfokus pada penawaran program kesejahteraan langsung yang konkret dan taktis. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap kebijakan sosial berbasis pemenuhan hak material dasar, artikel ini berargumen bahwa strategi ini menjadi instrumen efektif untuk menembus dan menyaingi dominasi jaringan patronase tradisional serta kekuatan oligarki. Artikel ini menyimpulkan bahwa populisme programatik tidak hanya mengubah cara mobilisasi pemilih di tingkat akar rumput, tetapi juga menawarkan reposisi penting dalam pemenuhan hak-hak material masyarakat kelas bawah menuju pelembagaan politik kesejahteraan yang lebih teknokratis di Indonesia.

Abstract

Studies on populism in Indonesia have generally been dominated by narratives of identity-based polarization and demagogic rhetoric. However, the contemporary political landscape reveals a significant shift marked by the emergence of programmatic populism. This article analyzes how political actors in Indonesia adopt pragmatic and technocratic populist strategies to garner mass support. Unlike classical populism, which relies on ethnic, racial, and religious (SARA) sentiments, programmatic populism focuses on offering concrete and tactical direct welfare programs. Employing a qualitative analysis of social policies centered on the fulfillment of basic material rights, the article argues that this strategy serves as an effective instrument for penetrating and challenging the dominance of traditional patronage networks and oligarchic forces. The article concludes that programmatic populism not only transforms grassroots voter mobilization but also offers a crucial repositioning regarding the fulfillment of the lower class's material rights, moving toward a more technocratic institutionalization of welfare politics in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 kerap digambarkan melalui lensa paradoks yang membingungkan para ilmuwan politik. Di satu sisi, pelembagaan demokrasi prosedural berjalan dengan konsisten: pemilihan umum reguler terselenggara secara periodik, desentralisasi kekuasaan berjalan dinamis, dan partisipasi publik dalam pemilu tergolong tinggi. Namun, di sisi lain, substansi dari demokrasi itu sendiri terus mengalami erosi dan pembajakan struktural oleh kekuatan-kekuatan material yang menolak redistribusi kekuasaan yang riil. Dalam lanskap politik dan ekonomi kontemporer Indonesia, tegangan dialektis ini tidak dapat dipahami secara parsial. Terdapat lima pilar fenomena yang saling mengunci, berkelindan, dan membentuk watak kekuasaan di Indonesia hari ini: populisme programatik, populisme teknokratis, transformasi kebijakan kesejahteraan, persistensi patronase politik, serta cengkeraman oligarki. Kelima dimensi ini bekerja layaknya sebuah ekosistem yang mengatur bagaimana mandat rakyat dihimpun di permukaan, dan bagaimana sumber daya material didistribusikan di balik layar.

Pergeseran paling mencolok dalam strategi legitimasi politik di Indonesia bermula dari transformasi gaya kepemimpinan elektoral. Pasca-era reformasi awal yang sarat dengan retorika transisional dan mobilisasi sentimen primordial, muncul sebuah varian baru perebutan simpati massa yang dikenal sebagai populisme programatik. Fenomena ini menemukan momentum puncaknya seiring dengan trajektori politik Joko Widodo, mulai dari kepemimpinannya di tingkat lokal (Solo), regional (DKI Jakarta), hingga menduduki tampuk kepresidenan selama dua dekade terakhir. Berbeda dengan populisme klasik yang bertumpu semata pada demagogi, karisma personal yang meluap-luap, atau polarisasi identitas etno-religius, populisme programatik menawarkan relasi yang lebih rasional dan terstruktur antara pemimpin dan konstituen. Hubungan politik dibangun melalui janji-janji kebijakan publik yang konkret, terukur, dan langsung menyentuh hajat hidup masyarakat kelas bawah. Janji politik tersebut tidak lagi berhenti pada pidato abstrak, melainkan diterjemahkan secara sistematis melalui institusi negara lewat instrumen-instrumen populis yang terlembaga, seperti peluncuran aneka "kartu jaminan sosial" mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Model pendekatan ini menciptakan ikatan elektoral yang kuat karena publik merasakan kehadiran langsung negara dalam pemenuhan hak-hak dasar sosial-ekonomi mereka.

Gaya politik programatik tersebut kemudian berpadu secara hibrida dengan populisme teknokratis. Jika populisme pada umumnya dicirikan oleh sikap anti-elitis dan penolakan terhadap prosedur birokrasi yang rumit demi kehendak murni rakyat, populisme teknokratis di Indonesia justru mengawinkan retorika "membela kepentingan rakyat" dengan pendekatan manajerial korporasi modern yang dingin, efisien, berbasis data, dan mengagungkan peran para teknokrat serta ahli. Dalam paradigma ini, kepemimpinan politik diposisikan bukan sebagai arena diskursus ideologis yang deliberatif, melainkan sebagai mesin eksekusi (delivery-oriented) dan pemecahan masalah praktis (problem-solving). Narasi utama yang dibangun ke ruang publik adalah efisiensi, rasionalitas teknis, dan kecepatan hasil. Manifestasi nyata dari populisme teknokratis ini terlihat jelas dalam akselerasi pembangunan infrastruktur fisik secara masif dan agresif—jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga bandara—serta digitalisasi birokrasi pemerintahan. Bahkan, demi mengejar target efisiensi dan akselerasi ekonomi yang dianggap mewakili kepentingan umum, prosedur deliberasi hukum yang berbelit-belit dipangkas secara radikal, sebagaimana tercermin dalam eksperimen hukum perundang-undangan seperti metode Omnibus Law. Di sini, perdebatan kritis dan partisipasi publik yang bermakna kerap disingkirkan dengan dalih bahwa regulasi yang kaku adalah hambatan yang harus diterobos demi efisiensi dan kesejahteraan rakyat.

Kombinasi antara populisme programatik dan teknokratis pada gilirannya mengubah kedudukan dan signifikansi kebijakan kesejahteraan (welfare policy) di Indonesia. Secara historis, perlindungan sosial di Indonesia pasca-krisis moneter didominasi oleh skema bantuan sosial (bansos) yang bersifat ad-hoc, darurat, dan terfragmentasi. Namun, dalam dua dekade terakhir, terjadi lompatan kelembagaan yang signifikan di mana jaring pengaman sosial ditransformasikan menjadi kerangka kesejahteraan universal yang lebih permanen dan terkonsolidasi, seperti operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta perluasan Program Keluarga Harapan (PKH). Kendati demikian, evolusi kelembagaan ini memunculkan paradoks tersendiri. Alih-alih murni berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan perwujudan hak kewargaan (citizenship rights) yang universal dari negara kesejahteraan modern, kebijakan kesejahteraan di Indonesia terus rentan terkooptasi menjadi komoditas politik elektoral. Perlindungan sosial kerap diperlakukan sebagai barang

dagangan politik (political commodities) yang sengaja digelontorkan atau diintensifkan momentum penyalurannya menjelang kontestasi pemilu, demi memastikan loyalitas pemilih tetap terjaga kepada kubu petahana atau suksesor yang didukungnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa di balik rasionalitas kebijakan publik dan modernisasi programatis yang tampak di panggung depan (front-stage), panggung belakang (back-stage) politik Indonesia tetap digerakkan oleh bahan bakar purba demokrasi elektoral: patronase politik. Desain institusional pemilu di Indonesia khususnya adopsi sistem proporsional daftar terbuka, pemilihan presiden secara langsung, serta personalisasi politik yang ekstrem telah melahirkan iklim kompetisi elektoral yang berbiaya luar biasa mahal (high-cost politics). Dalam realitas empiris di tingkat akar rumput, rasionalitas pemilih programatik tidak pernah sepenuhnya menggantikan logika klientelistik. Relasi patron-klien yang bersifat transaksional dan asimetris tetap menjadi syarat mutlak kemenangan politik. Para kandidat dan partai politik terpaksa menjalankan patronase material secara terus-menerus untuk merawat jejaring konstituen, mulai dari pembagian uang tunai dan sembako (money politics) menjelang hari pemungutan suara, hingga pemanfaatan instrumen formal negara seperti alokasi dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif untuk proyek-proyek lokal yang menguntungkan kelompok pendukungnya. Yang lebih problematis, batas antara program jaminan sosial resmi milik negara dengan bantuan patronase personal sering kali dikaburkan secara sengaja; program bantuan sosial negara kerap dibungkus, dicitrakan, dan dipersonalisasi sebagai "kebaikan hati" atau kemurahan personal figur politik tertentu demi mengikat suara pemilih miskin.

Kebutuhan finansial yang luar biasa besar untuk menggerakkan mesin patronase elektoral inilah yang menjadi pintu masuk sekaligus benteng pertahanan bagi oligarki Indonesia. Sebagaimana dianalisis secara tajam oleh para sarjana ekonomi politik seperti Jeffrey Winters dan Richard Robison, transisi demokrasi pasca-1998 tidak pernah menghancurkan basis material elite predatori warisan rezim Orde Baru; reformasi hanyalah arena di mana para oligark mereorganisasi dan memformat ulang cara mereka beroperasi di bawah aturan main demokrasi multipartai. Oligarki yang didefinisikan sebagai segelintir elite yang menguasai konsentrasi kekayaan material ekstrem dan menggunakan kekayaan tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya—menemukan simbiosis mutualisme dengan para politisi. Karena politisi membutuhkan pendanaan raksasa untuk membiayai kampanye dan memelihara jejaring patronase, para oligark hadir sebagai penyandang dana politik (political dowry), atau bahkan para pemilik modal itu sendiri yang langsung terjun menduduki pucuk pimpinan partai politik dan jabatan-jabatan strategis kabinet. Cengkeraman oligarki ini merambah sektor-sektor ekonomi ekstraktif yang paling menguntungkan, mulai dari industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit skala besar, energi, hingga konglomerasi media massa. Akses langsung terhadap kekuasaan politik menjadi syarat mutlak bagi para oligark untuk memastikan regulasi negara, lisensi konsesi lahan, perlindungan hukum, dan kebijakan perpajakan tetap bekerja demi mengamankan dan melipatgandakan akumulasi kapital mereka.

Apabila kelima fenomena ini disintesis dalam satu kerangka analitis yang utuh, tampak jelas bahwa politik Indonesia kontemporer beroperasi dalam sebuah siklus sirkular yang terstruktur rapi. Titik tolaknya berakar pada kepentingan material oligarki yang membutuhkan kendali atas kebijakan negara guna melindungi imperium bisnis mereka. Namun, di bawah iklim demokrasi elektoral, kekuasaan tidak dapat direbut semata-mata dengan kekuatan uang atau pemaksaan koersif; kekuasaan menuntut legitimasi berupa suara mayoritas rakyat di bilik suara. Demi memenangkan hati jutaan pemilih tanpa memicu resistensi kelas atau letupan revolusioner dari bawah, para pemimpin politik mengadopsi populisme programatik dan populisme teknokratis. Melalui panggung depan ini, negara dipresentasikan sebagai pelayan publik yang bekerja tanpa lelah, menghadirkan pembangunan infrastruktur yang megah, serta menyalurkan berbagai kebijakan kesejahteraan dan bantuan sosial.

Kendati demikian, karena programatisasi negara tersebut belum sanggup menghapus kemiskinan struktural, kerentanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput tetap dieksploitasi melalui praktik patronase politik yang intensif. Bantuan sosial negara bahkan dikapitalisasi menjadi alat transaksi patronase untuk mengunci loyalitas elektoral. Begitu kemenangan pemilu berhasil dikunci melalui perpaduan ciamik antara citra populis, janji kesejahteraan, dan guyuran patronase materi, mandat kekuasaan yang telah diperoleh tersebut segera dialihkan kembali ke ruang-ruang tertutup. Di ruang tertutup itulah formulasi kebijakan makroekonomi, deregulasi perizinan, dan konsesi sumber daya alam dirumuskan kembali secara teknokratis untuk melayani kepentingan akumulasi kapital para oligarki yang telah mendanai kontestasi sejak awal.

Secara metaforis, dinamika kekuasaan di Indonesia kontemporer dapat dibedah melalui pemisahan analitis antara panggung depan (front-stage) dan panggung belakang (back-stage). Populisme programatik, rasionalitas teknokratis, dan kebijakan kesejahteraan beroperasi di panggung depan sebagai etalase publik yang legal, modern, dan populer guna memproduksi legitimasi elektoral. Sebaliknya, patronase politik dan relasi kuasa oligarkis beroperasi di panggung belakang sebagai mesin penggerak sesungguhnya yang menentukan bagaimana kekuasaan dinegosiasikan, bagaimana kebijakan publik disandera, serta bagaimana kekayaan nasional didistribusikan secara timpang. Membedah bagaimana kelima pilar ini saling berkelindan, bernegosiasi, dan melanggengkan paradoks demokrasi di Indonesia inilah yang menjadi urgensi intelektual serta fokus utama yang akan dianalisis secara mendalam dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk membedah secara mendalam relasi dialektis antara populisme programatik, populisme teknokratis, kebijakan kesejahteraan, patronase politik, dan oligarki di Indonesia (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristik persoalan yang diteliti menuntut eksplorasi terhadap makna di balik fenomena, relasi kuasa yang tersembunyi, serta mekanisme pembajakan institusi demokrasi yang tidak dapat diukur semata melalui kalkulasi numerik atau kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018). Lebih jauh, penelitian ini diposisikan dalam kerangka ekonomi politik kritis (critical political economy) dan studi institusionalisme historis, sebuah paradigma yang memandang bahwa kebijakan publik dan dinamika elektoral tidak pernah bersifat netral dari pertarungan kepentingan kelas serta konsentrasi kekuatan material elite (Robison & Hadiz, 2004; Winters, 2011).

Desain penelitian ini mengadopsi model studi kasus eksplanatoris (explanatory case study) dengan fokus pada dinamika politik-kebijakan nasional di Indonesia era kontemporer, khususnya era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga masa transisi elektoral pasca-2024 (Yin, 2018). Model studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengurai pertanyaan fundamental mengenai bagaimana (how) dan mengapa (why) instrumen kesejahteraan dan narasi teknokratis di panggung depan (front-stage) dapat berkoeksistensi dan bersimbiosis secara fungsional dengan praktik patronase dan dominasi oligarki di panggung belakang (back-stage) (Goffman, 1959; Aspinall & Berenschot, 2019).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (documentary research) dan penelusuran literatur secara mendalam (Bowen, 2009). Korpus data sekunder dihimpun dari tiga kluster utama:

1. Dokumen Kebijakan Resmi Negara: Mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, naskah akademik legislasi strategis (seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba), laporan realisasi anggaran perlindungan sosial (APBN), serta publikasi statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial terkait distribusi program kesejahteraan (BPJS, PKH, dan Bansos).
2. Kajian Ilmiah dan Riset Terdahulu: Meliputi artikel jurnal bereputasi, buku referensi, serta laporan riset independen mengenai patronase elektoral, klientelisme, dan ekonomi politik oligarki di Asia Tenggara (misalnya Aspinall & Sukmajati, 2016; Hadiz, 2010; Mietzner, 2015; Warburton, 2016).
3. Arsip Media Massa dan Laporan Investigasi: Berita, liputan investigatif, serta data pemantauan pemilu dari media arus utama terpercaya dan lembaga masyarakat sipil (seperti Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) yang mencatat pola distribusi bantuan sosial, pendanaan kampanye, serta keterlibatan elite bisnis dalam kontestasi elektoral.

Untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Patton, 2015). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan klaim naratif pemerintah dalam dokumen resmi dengan temuan investigatif masyarakat sipil serta liputan media independen. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengonfrontasi data empiris menggunakan berbagai perspektif teoretis yang relevan, terutama mempertemukan teori oligarki material (Winters, 2011), teori klientelisme dan patronase elektoral (Aspinall & Berenschot, 2019), serta teori populisme teknokratis (Bickerton & Invernizzi Accetti, 2017).

Teknik analisis data dijalankan secara iteratif dan sirkular mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup empat tahapan terpadu:

- Pertama, pengumpulan data (data collection): Peneliti menghimpun dan memetakan seluruh korpus literatur dan dokumen kebijakan yang relevan dengan kelima variabel penelitian.
- Kedua, kondensasi data (data condensation): Peneliti memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah melalui proses pengodean tematik (thematic coding), yakni mengelompokkan data ke dalam kategori panggung depan (populisme programatik, populisme teknokratis, dan kebijakan kesejahteraan) dan panggung belakang (patronase elektoral dan manuver oligarkis).
- Ketiga, penyajian data (data display): Data yang telah dikategorisasikan dirajut ke dalam narasi analitis yang sistematis, runtut, dan logis, sehingga pola hubungan kausal dan keterkaitan dialektis antar-konsep dapat tergambarkan secara komprehensif.
- Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (drawing and verifying conclusions): Peneliti merumuskan kesimpulan teoretis dan kritis mengenai mekanisme siklus kekuasaan di Indonesia, sekaligus memverifikasi temuan tersebut secara konsisten dengan rujukan empiris yang telah diuji keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Formulasi kebijakan publik di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknokratis yang steril dan bebas nilai. Sebaliknya, apa yang tampak sebagai "kebijakan publik" pada hakikatnya merupakan artikulasi dari "politik kebijakan" sebuah arena kontestasi kekuasaan di mana kebijakan negara difungsikan sebagai instrumen untuk memelihara dominasi elite dan mengamankan kepatuhan elektoral (Hadiz & Robison, 2013). Hubungan antara negara dan masyarakat di Indonesia kontemporer dibentuk oleh konvergensi antara populisme pragmatik, populisme teknokratis, kebijakan kesejahteraan, patronase politik, dan oligarki. Kelima elemen ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan menyatu membentuk struktur insentif politik yang mengendalikan proses pembuatan kebijakan.

Dimensi pertama yang menonjol adalah operasionalisasi populisme pragmatik. Dalam literatur ilmu politik, populisme kerap dimaknai sebagai ideologi tipis (thin-centred ideology) yang membelah masyarakat menjadi dua kutub antagonis: "rakyat murni" versus "elite korup" (Mudde, 2004). Namun, dalam konteks Indonesia, populisme bermutasi menjadi corak yang sangat pragmatis; ia tidak mengusung platform perombakan struktur sosial radikal, melainkan berfokus pada perolehan simpati publik jangka pendek demi memenangkan kontestasi elektoral (Mietzner, 2015). Aktor-aktor politik mengemas pesan-pesan politik melalui personalisasi dan branding media sosial secara intensif (seperti pemanfaatan algoritma TikTok dan Instagram). Tujuannya adalah memproyeksikan persona pemimpin yang merakyat, santun, bersahaja, atau bahkan jenaka (gemoy/relatable). Gaya komunikasi ini secara efektif mendepolitisasi warga negara: diskursus struktural mengenai ketimpangan ekonomi dan konflik agraria digantikan oleh konsumsi citra personal yang menghibur, sehingga tuntutan rakyat cukup dipenuhi melalui intervensi instan di permukaan tanpa mengganggu relasi kuasa yang timpang.

Gaya pragmatis tersebut kemudian diperkuat dan dilegitimasi oleh populisme teknokratis. Sebagaimana diargumentasikan oleh Bickerton dan Invernizzi Accetti (2017), populisme dan teknokrasi bukanlah antitesis mutlak, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama dalam menolak politik deliberatif. Populisme teknokratis mengawinkan klaim "bekerja demi rakyat" dengan pembenaran rasionalitas manajerial, efisiensi birokrasi, dan kepatuhan pada angka-angka statistik. Proyek-proyek raksasa mulai dari pembangunan jaringan jalan tol, Proyek Strategis Nasional (PSN), hilirisasi industri ekstraktif, hingga relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dipasarkan ke hadapan publik dengan narasi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi makro. Dalam logika ini, suara-suara kritis dari serikat buruh, masyarakat adat, maupun pemerhati lingkungan dilemahkan atau disingkirkan dengan dalih bahwa deliberasi publik yang berlarut-larut merupakan hambatan (bottleneck) bagi kemajuan bangsa. Pengambilan keputusan strategis dijalankan secara sentralistik (top-down) dengan mengorbankan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), menciptakan ilusi bahwa keputusan pemerintah adalah kebenaran objektif yang tidak boleh diperdebatkan (Warburton, 2016).

Dalam skema tersebut, kebijakan kesejahteraan (welfare policy) diposisikan sebagai jaring pengaman stabilitas rezim sekaligus amunisi politik. Program-program jaminan sosial seperti Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta aneka subsidi pangan dan energi sejatinya krusial untuk menopang kehidupan kelompok rentan (TNP2K, 2020). Namun, dinamika di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial kerap mengalami instrumentalisasi politik yang vulgar. Di bawah naungan negara berkembang dengan sistem demokrasi klientelistik, kebijakan jaring pengaman sosial rentan digeser fungsinya dari hak universal kewargaan (*social rights*) menjadi hadiah kebaikan hati penguasa (Mares & Young, 2016). Akibatnya, distribusi bantuan sosial acap kali dimanipulasi ritme penyalurannya menjelang momen elektoral seperti Pemilu atau Pilkada, sehingga mengubah perlindungan sosial menjadi barang dagangan politik (*political handouts*) demi mendikte arah pilihan pemilih miskin.

Di balik panggung formal kebijakan sosial dan pembangunan fisik tersebut, mesin politik yang sesungguhnya digerakkan oleh patronase politik. Mahalnya biaya kontestasi pemilu di Indonesia—yang dipicu oleh sistem proporsional terbuka, meluasnya transaksi politik uang, dan biaya operasional tim sukses menciptakan keniscayaan bagi penguasa terpilih untuk mendistribusikan konsesi ekonomi dan politik kepada para penyokongnya (Aspinall & Berenschot, 2019). Distribusi keuntungan material ini mengambil wujud yang beragam, mulai dari alokasi pos-pos kementerian dan lembaga negara dalam kabinet koalisi, pembagian kursi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada relawan dan elit partai, hingga pemberian konsesi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Patronase menjadi perekat utama yang merawat kesetiaan jejaring politik agar instabilitas koalisi dapat diredam.

Pada fondasi paling mendasar, seluruh jejaring ini bersandar pada kekuatan oligarki Indonesia. Winters (2011) mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan material oleh para pemilik kapital ekstrem. Di Indonesia, para oligark tidak sekadar berdiri di luar sistem untuk melobi pembuat kebijakan, melainkan telah melebur ke dalam institusi politik formal—sebuah fenomena pertautan penguasa-pengusaha (*business-politics nexus*) (Robison & Hadiz, 2004). Karena kandidat politik memerlukan sokongan dana kampanye yang masif, oligarki bertindak sebagai penyandang dana utama (*political financier*). Setelah kandidat tersebut menduduki jabatan publik, "utang politik" ini dikompensasi dalam bentuk regulasi yang melonggarkan perizinan tambang, kemudahan hak guna usaha (HGU) perkebunan, insentif fiskal, serta pelemahan regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

Keterkaitan kelima konsep ini membentuk sebuah siklus ketergantungan struktural:

1. Injeksi Modal Oligarkis: Para pemilik modal menyuplai logistik raksasa ke dalam pusaran pemilu.
2. Mobilisasi Massa Populis: Aktor politik mendayagunakan populisme pragmatik dan menjanjikan perluasan kebijakan kesejahteraan (*bansos*) untuk menghimpun suara mayoritas rakyat secara cepat.
3. Legitimasi Teknokratis Pasca-Pemilu: Rezim terpilih merumuskan proyek-proyek fisik skala besar berkedok kepentingan rakyat secara teknokratis, yang pada praktiknya banyak digarap oleh konglomerasi atau korporasi yang terafiliasi dengan lingkaran kekuasaan.
4. Distribusi Patronase Berkelanjutan: Rente ekonomi dari kebijakan dan proyek negara kemudian dialirkan kembali melalui kanal patronase politik untuk menjaga soliditas koalisi dan membalas jasa para oligark penyokong kekuasaan.

Siklus ini menghasilkan stabilitas rezim yang semu di permukaan, namun secara substantif membusukkan demokrasi karena institusi negara dikelola bukan untuk kebaikan publik bersama (*public good*), melainkan demi memfasilitasi kompromi dan transaksi antar-elite.

Ketika ditarik ke dalam realitas politik Indonesia hari ini khususnya pada fase konsolidasi kekuasaan pasca-Pemilu 2024 dan transisi kepemimpinan nasional kelima konsep tersebut menemukan perwujudan empiris yang semakin vulgar dan terlembaga. Relasi kekuasaan kontemporer memperlihatkan bagaimana elite negara mengawinkan retorika kerakyatan dengan kooptasi struktural guna mempertahankan cengkeraman kekuasaan tanpa kehilangan legitimasi demokratis semu di mata publik (Aspinall et al., 2024).

Pertama, populisme programatik telah bertransformasi menjadi instrumen utama pelembagaan loyalitas elektoral. Fenomena ini tercermin jelas dalam kontinuitas kebijakan sosial dari era Joko Widodo hingga transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu manifestasi paling nyata dari populisme programatik mutakhir adalah peletakan program skala raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak lagi dijual melalui wacana ideologis abstrak, melainkan sebagai janji redistribusi material konkret yang langsung menjangkau jutaan rumah tangga

di lapisan bawah. Melalui janji pemenuhan gizi anak sekolah, rezim berhasil menciptakan ilusi kehadiran negara yang intim di ruang privat keluarga, seraya menanamkan memori kolektif bahwa keberlanjutan pasokan makanan harian tersebut bergantung pada kelangsungan rezim politik yang menginisiasinya (Mietzner, 2024).

Kedua, populisme teknokratis semakin dipercanggih dengan "mempersenjатаi" indikator statistik, metrik pertumbuhan ekonomi, dan legitimasi para pakar untuk membungkam oposisi demokratis. Kebijakan-kebijakan kontroversial—seperti percepatan hilirisasi nikel, Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah, hingga regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja—secara konsisten dinarasikan sebagai keharusan ilmiah demi mengejar status negara berpendapatan tinggi (high-income nation) pada visi Indonesia Emas 2045. Di bawah kepemimpinan bergaya korporat (corporate-style governance), efisiensi eksekusi diagungkan di atas kepatuhan terhadap prinsip negara hukum (rule of law). Hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) kerap dikesampingkan dengan stempel bahwa kritik masyarakat adalah upaya menghambat investasi nasional (Power, 2018; Warburton, 2020). Negara dikelola layaknya dewan direksi korporasi di mana target capaian fisik (deliverables) menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, menafikan ongkos ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat lokal.

Ketiga, kebijakan kesejahteraan (welfare policy) di Indonesia masa kini terdistorsi menjadi instrumen klientelistik negara (state clientelism). Program-program perlindungan sosial, seperti BLT El Niño, bansos beras, dan bantuan pangan lainnya yang digelontorkan dalam skala luar biasa masif menjelang Pemilu 2024, membuktikan bagaimana bantuan yang bersumber dari uang publik (APBN) dipersonifikasikan menjadi bentuk kemurahan hati figur pemimpin tertentu. Bantuan sosial tidak diposisikan sebagai jaring pengaman jangka panjang yang emansipatoris—misalnya melalui penguatan lapangan kerja layak atau redistribusi aset tanah—melainkan dipertahankan sebagai bantalan konsumtif temporer. Pola ketergantungan struktural ini sengaja dipelihara; masyarakat rentan yang terus-menerus membutuhkan bantuan instan menjadi segmen pemilih yang sangat patuh terhadap arahan politik elektoral rezim penguasa demi menjamin kelangsungan bantuan tersebut di masa depan.

Keempat, praktik patronase politik menemukan puncak institusionalisasinya dalam fenomena pembentukan kabinet pemerintahan yang luar biasa gemuk pasca-Pemilu 2024. Restrukturisasi kementerian dan lembaga dengan memperbanyak pos menteri, wakil menteri, hingga kepala badan khusus merupakan representasi telanjang dari politik akomodasi elite (cartelized politics) (Ambardi, 2008; Slater, 2018). Kursi-kursi kekuasaan dibagikan secara transaksional kepada para pimpinan partai politik koalisi pendukung, pimpinan ormas keagamaan, purnawirawan militer, hingga pentolan tim kampanye kemenangan. Di tingkat daerah, praktik patronase ini berakar dalam kontestasi Pilkada melalui penyaluran izin usaha dan dana hibah untuk mengamankan jaringan birokrasi dan mesin partai lokal. Dengan merangkul hampir seluruh kekuatan partai politik ke dalam barisan kekuasaan, ruang oposisi di parlemen praktis teramputasi, menyisakan checks and balances yang mandul di hadapan kehendak eksekutif.

Kelima, oligarki Indonesia tetap beroperasi sebagai sutradara, arsitek kebijakan, dan penyandang dana utama dari seluruh ekosistem politik ini. Tesis Hadiz dan Robison (2014) mengenai reorganisasi kekuasaan oligarki terbukti semakin menguat di era kontemporer. Kemenangan elektoral para pemimpin populis mustahil terwujud tanpa gelontoran modal raksasa dari para konglomerat tambang, perkebunan, dan energi. Hubungan simbiosis mutualisme ini menuntut imbal balik yang konkret. Pasca-pemilu, aliansi teknokrat dan politisi segera meloloskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para oligark, seperti pemberian perpanjangan izin konsesi tambang secara otomatis, pembebasan pajak (tax holiday), pemutihan jutaan hektare lahan perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan, hingga keterlibatan perusahaan swasta milik lingkaran elite dalam rantai pasok proyek-proyek strategis negara.

Secara keseluruhan, realitas politik kekinian di Indonesia memperlihatkan sebuah arsitektur hegemoni yang solid: populisme programatik dan teknokrasi menjadi topeng moral di panggung depan (front-stage) untuk membius dan merebut konsensus rakyat melalui bantuan langsung dan retorika kemajuan fisik, sementara patronase akomodatif dan eksploitasi oligarkis merajalela di panggung belakang (back-stage) untuk memastikan kekayaan sumber daya alam dan kekuasaan negara tetap terkonsentrasi di tangan segelintir elite pemodal.

PENUTUP

Lanskap politik dan ekonomi Indonesia kontemporer memperlihatkan sebuah arsitektur kekuasaan yang bekerja secara canggih, terpadu, dan saling mengunci ke dalam sebuah siklus hegemoni yang solid. Realitas ini membuktikan bahwa kekuasaan tidak lagi dipertahankan semata melalui represi fisik atau paksaan koersif, melainkan melalui sintesis dialektis antara ekstraksi material dan manufaktur legitimasi moral. Siklus ini berputar dalam suatu relasi sirkular yang terstruktur rapi: kekuatan oligarki menyediakan pasokan modal raksasa guna mendanai kontestasi pemilu dan mendikte arah regulasi strategis; modal tersebut kemudian dikapitalisasi melalui mesin patronase politik untuk mengamankan konsolidasi antarelite serta membagi kue kekuasaan; pada saat yang sama, elite merumuskan pendekatan populisme programatik dan teknokratis untuk merayu konstituen melalui janji terukur berbasis data; janji tersebut lantas dieksekusi melalui kebijakan kesejahteraan yang terkooptasi seperti gelontoran bantuan sosial dan program populis masif layaknya Makan Bergizi Gratis guna meredam letupan resistensi sipil sekaligus mengunci preferensi elektoral; dan pada muaranya, tercapailah legitimasi kekuasaan penuh yang melanggengkan dominasi aliansi elite dan oligarki di puncak piramida negara.

Di tengah bekerjanya siklus sirkular tersebut, dinamika politik Indonesia mengalami apa yang dapat disebut sebagai komodifikasi moral yang akut. Politik kebajikan (*politics of virtue*)—yang secara normatif semestinya menempatkan etika publik, keadilan distributif, hak asasi manusia, serta integritas penegakan hukum di atas kalkulasi kekuasaan privat telah terdegradasi menjadi sekadar kosmetik dan komoditas politik (*political gimmick*). Narasi kesalehan sosial, pencitraan kesederhanaan personal, serta jargon persatuan nasional tidak lebih dari tameng moral yang diproduksi secara massal untuk membungkam nalar kritis publik. Moralitas didefinisikan secara sempit dan dangkal hanya sebatas "kebaikan yang kasatmata di depan kamera": pembagian bahan pangan pokok di tengah kerumunan, seremoni peluncuran kartu-kartu jaminan sosial, serta pembangunan fisik berskala megah. Pertarungan politik hari ini sengaja dijauhkan dari perdebatan substantif mengenai keadilan struktural, reformasi agraria, maupun pengusutan korupsi kelas kakap, karena moralitas telah diredam menjadi instrumen transaksional semata demi menukar kepatuhan rakyat miskin dengan legitimasi moral bagi para penguasa.

Gejala ini secara tajam melahirkan paradoks penurunan demokrasi substantif di tengah bekerjanya demokrasi prosedural yang tampak mapan (*illiberal democracy*). Pemilihan umum berkala tetap terlaksana secara tertib, partisipasi pemilih di bilik suara tetap tergolong tinggi, dan anggaran perlindungan sosial terus dikururkan dalam angka triliunan rupiah. Namun, di balik fasad prosedural yang tertata tersebut, kedaulatan rakyat mengalami pembajakan substansial. Ruang gerak masyarakat sipil kian menyempit akibat represi digital dan kooptasi koalisi besar, sementara parlemen tereduksi menjadi stempel legitimasi bagi kartel elite. Terciptalah sebuah simbiosis yang menjebak: rakyat jelata mendapatkan bantalan bantuan sosial jangka pendek yang bersifat konsumtif demi bertahan hidup, namun sebagai gantinya, mereka harus merelakan mandat politiknya dibajak oleh aliansi predatoris. Melalui populisme teknokratis yang diagung-agungkan, diskursus publik mengalami depolitisasi massal; perdebatan mengenai hak buruh, perusakan lingkungan akibat industri ekstraktif, dan pelemahan lembaga antikorupsi secara halus disingkirkan atas nama efisiensi investasi, kecepatan pembangunan, dan target-target pertumbuhan ekonomi makro yang dingin.

Secara konseptual, fenomena ini membuka tabir bagaimana pemisahan antara panggung depan (*front-stage*) dan panggung belakang (*back-stage*) dioperasikan dalam tata kelola negara modern. Di panggung depan, para pemimpin menampilkan diri sebagai teknokrat berhati mulia—sosok manajerial yang pragmatis, pro-rakyat, dan mampu menghadirkan solusi kilat bagi pemenuhan kebutuhan dasar melalui aneka kartu sakti dan bansos terstruktur. Tindakan ini dipasarkan sebagai manifestasi tertinggi dari "politik kebajikan" negara. Akan tetapi, di panggung belakang yang sunyi dari sorotan publik, program-program kesejahteraan tersebut tidak pernah bebas dari kompromi transaksional. Agar kebijakan populis dan anggaran belanja sosial dapat disetujui tanpa ganjalan oleh parlemen dan kartel politik yang berkuasa, para perumus kebijakan dipaksa tunduk pada konsesi patronase dan konsensus

oligarkis. Kompromi di balik layar inilah yang menuntut imbal balik berupa pelanggaran izin tambang, konsesi lahan perkebunan skala luas, pelemahan pengawasan hukum, hingga pembagian pos-pos jabatan strategis dan komisariat BUMN kepada elite pendukung. Kesejahteraan rakyat di panggung depan pada hakikatnya ditebus dengan penyerahan aset-aset strategis bangsa kepada para oligark di panggung belakang.

Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa masa depan demokrasi di Indonesia bertumpu pada kemampuan membedah dan membongkar kepalsuan politik kebajikan yang telah terdistorsi tersebut. Selama populisme teknokratis dan kebijakan kesejahteraan hanya difungsikan sebagai alat penjinak massa untuk memuluskan akumulasi kapital oligarki, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tetap menjadi ilusi di atas kertas undang-undang. Kebijakan publik akan terus mencerminkan kesepakatan transaksional antar-elite pemodal, alih-alih representasi murni dari aspirasi warga negara. Tantangan terbesar dan pekerjaan rumah paling mendasar bagi masa depan bangsa ini adalah bagaimana merebut kembali makna sejati dari politik kebajikan dan moralitas publik: sebuah transformasi politik emansipatoris yang mampu membongkar jaringan patronase klientelistik, melepaskan cengkeraman oligarki dari rahim negara, serta memulihkan hak-hak kesejahteraan bukan lagi sebagai belas kasihan penguasa, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang berdaulat secara mutlak.

DAFTAR REFERENSI

- Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. *Democratization*, 21(5), 803–823. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.873791>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R., & Kimura, E. (2020). Welfare policy and politics in Indonesia: The politics of social protection. *Journal of Contemporary Asia*, 50(5), 683–701.
- Komarudin, U., Fonna, C. K., & Tsabitah, N. (2020). *Sistem sosial dan politik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Noeha, O., Fauzi, R. S., Meitasari, L., Ausop, A. Z., & Ridhania. (2023). *Dinamika politik Indonesia dari masa Orde Lama hingga Reformasi*. Langgam Pustaka.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Sumarto, M. (2020). Insecurity and historical legacies in welfare regime change in Southeast Asia: Insights from Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Journal of Contemporary Asia / Cambridge University Press*.
- Syafrial. (2024). Praktik patronase dalam pemilu dan implikasinya terhadap kredibilitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan*, 8(1), 45–68.
- Universitas Gadjah Mada. (1997–sekarang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*. Fisipol UGM.
- Universitas Indonesia. (2007–sekarang). *Jurnal Politik*. Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

- Wibowo, A. S., Wahyuni, K. A., & Wigena, I. B. W. (2025). *Dinamika politik Indonesia*. Tahta Media Group.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.